

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun kader bangsa yang cerdas, berkualitas baik dalam segi ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi maupun agama. Lembaga formal dalam penyelenggaraan pendidikan, bertanggung jawab besar dalam memberikan perubahan yang sesuai dengan perkembangan peserta didiknya demi menyongsong kehidupan masa depan yang lebih unggul. Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa serta sebagai wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (*nation character building*). Dengan terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berkualitas akan membentuk kemandirian dalam berbangsa dan bernegara yang merupakan investasi besar untuk berjuang menghadapi krisis dan dunia global.

Adapun tujuan negara yang telah digariskan dalam haluan negara agar pengelolaan pendidikan diarahkan pada desentralisasi,

menuntut partisipasi masyarakat secara aktif untuk merealisasikan otonomi daerah. Hal itu juga perlu adanya kesiapan sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan operasional pendidikan. Sistem pendidikan yang mengakomodasi seluruh elemen esensial diharapkan muncul dari pemerintah kabupaten kota sebagai penerima wewenang otonomi. Pendidikan yang semula ini dikelola oleh pusat (sentralisasi) harus diganti mengikuti irama perkembangan pendidikan yang sedang berkembang. Otonomi daerah sebagai kebijakan politik di tingkat makro akan memberi imbas terhadap otonomi sekolah sebagai sub sistem pendidikan nasional.

Sejak diamanahkan oleh Undang-Undang Pendidikan Nasional pada 2003, perkembangan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dirasakan cukup berhasil. Meski hal tersebut dibuktikan oleh banyaknya sekolah yang telah berhasil menggalang komitmen orangtua siswa untuk bekerja sama, tetapi, tidak bisa dipungkiri masih banyak sekolah yang butuh bimbingan teknis, serta sosialisasi mengenai MBS guna meningkatkan mutu pendidikan yang diperoleh siswa dari sekolah.

MBS sebenarnya bertujuan untuk memberikan sekolah kewenangan dengan menentukan sendiri pengelolaan sumber dayanya untuk meningkatkan prestasi siswa dan efektifitas belajar mengajar. Namun, untuk menjalankan MBS ini, dibutuhkan komitmen

dari komite sekolah yang terdiri dari warga sekolah, orangtua, dan masyarakat untuk mengawasi pengelolaan sekolah.

Pengelolaan sekolah yang paling mendasar antara lain yaitu dalam penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sering menimbulkan konflik antara orangtua, masyarakat dan pihak sekolah. Mengenai kontribusi MBS terhadap keberhasilan pengelolaan sekolah, MBS dinilai mampu menumbuhkan rasa kepemilikan orangtua dan siswa terhadap sekolah.<sup>1</sup>

Untuk itu, diperlukan tiga pilar untuk menopang keberhasilan pelaksanaan MBS, yakni manajemen sekolah, Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (Pakem), serta partisipasi masyarakat. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah), memberikan fleksibilitas atau keluwesan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha) dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan undang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://news.okezone.com/read/2011/08/09/373/490067/mbs-masih-perlu-disosialisasikan-ke-sekolah> (11-07-17, jam 14:12 wib)

<sup>2</sup> Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik* (Bandung:Refrika Aditama,2010), h. 47

Manajemen berbasis sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana harus berkaitan. Untuk perencanaan, pengadaan, dan pengawasan dibutuhkan kewenangan dari pihak sekolah untuk berjalannya pengelolaan tersebut. Maka dari itu pengelolaan pendidikan di sekolah bukan berarti sekolah lepas dari campur tangan pemerintah dan masyarakat, dan bukan berarti sekolah bebas tanpa batas menentukan dana sekolah yang dibebankan kepada siswa. Sekolah memiliki kewajiban menggalang kerjasama timbal balik dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah (*stakeholders*), dan bahkan tidak ada program yang dapat berjalan tanpa dukungan dari pihak orang tua dan *stakeholders* lainnya.

Dengan demikian, manajemen berbasis sekolah merupakan suatu proses mengatur dan mengelola segala sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, yaitu : kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, keuangan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat (humas). Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa :

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia ini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan

standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.<sup>3</sup>

Penjelasan pada pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang memadai meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Mengingat sarana dan prasarana itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting bagi terlaksananya proses pembelajaran di sekolah serta menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Menurut Ary Gunawan yang dikutip oleh Ambar Arum, manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah:

Manajemen Sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinyu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai (*ready for use*) dalam proses belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar semakin efektif

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses pendayagunaan pada sarana dan prasarana pendidikan di sekolah untuk mempersiapkan terciptanya tujuan pendidikan yang diinginkan. Hal tersebut untuk menunjukkan pentingnya aspek sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pendidikan.

Maka lembaga pendidikan sekolah, memerlukan dukungan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan material pendidikan yang sangat penting dan menjadi satu dari delapan standar nasional pendidikan. Banyak sekolah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap sehingga sangat menunjang proses pendidikan di sekolah. Baik guru maupun siswa, merasa terbantu dengan adanya fasilitas tersebut.

Hasil *grandtour* pada tanggal 28 Februari 2017, penelitian mendapatkan informasi terkait dengan fasilitas yang di miliki di SMA Islam Al Azhar Kelapa Gading Jakarta Utara. Sarana dan prasarana di SMA Islam Al Azhar Kelapa Gading sudah mencukupi untuk berjalannya kegiatan pembelajaran. Sehingga ketersediaan fasilitas

---

<sup>4</sup> Wahyu Sri Ambar Arum, *Manajemen Sarana dan Prasaran Pendidikan* (Jakarta: Multi Karya Mulia, 2007), h.6

sekolah yang menunjang kegiatan pembelajaran tidak lepas dari kerja sama seluruh warga SMA Islam Al Azhar Kelapa Gading yaitu kepala sekolah, guru, karyawan, dan peserta didik yang menyadari perlunya menjaga fasilitas sekolah agar dapat bertahan lama dan dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien. Selain itu, terciptanya juga komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan yayasan serta sikap responsif ketika terdapat fasilitas yang rusak untuk cepat diperbaiki atau diganti dengan yang baru melalui laporan kepala sekolah kepada pihak yayasan demi memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang *ready for use*.

Perencanaan sarana dan prasarana yang dilakukan di SMA Islam Al Azhar Kelapa Gading yaitu dengan mengevaluasi sebelum pelaksanaan tahun pelajaran baru. Sarana dan prasarana yang rusak atau masih kurang dilakukan dengan inventaris untuk dijadikan sebagai perencanaan tahun pelajaran baru selanjutnya, setelah itu diajukan ke yayasan sehingga harus ada perbaikan pada poin-poin tertentu untuk sarana dan prasarana tersebut. Kemudian pada kegiatan pengadaan yang ada di SMA Islam Al Azhar dengan mengajukan usulan sarana dan prasarana yang dibutuhkan kepada yayasan, pihak yayasan akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan melihat skala prioritas terhadap barang mana yang paling dibutuhkan

terlebih dahulu dengan memperhatikan manajemen waktu untuk merealisasikan.

Pada kegiatan pengawasan di SMA Islam Al Azhar Kelapa Gading dilakukan dengan monitoring pada setiap harinya. Tim monitoring memberikan laporan mengenai sarana dan prasarana yang rusak atau masih kurang kepada kepala bagian sarana dan prasarana. SMA Islam AL Azhar Kelapa Gading Jakarta Utara memiliki tim pemeliharaan baik dari pihak yayasan maupun pihak sekolah yang biasanya disebut dengan petugas atau *cleaning service*. Jika terdapat masalah pada sarana dan prasarana, pihak yayasan akan mengirim petugas untuk memperbaiki barang yang rusak atau menggantikan yang baru sesuai laporan dari pihak sekolah. Sekolah juga memiliki staf sarana dan prasarana yang bertugas hanya menerima informasi dari semua guru tentang kaitan dengan sarana dan prasarana di kelas maupun di luar kelas yang kemudian akan menyampaikan informasi tersebut ke pihak yayasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Manajeen Sarana dan Prasarana dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading Jakarta Utara”**

## **B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Adapun sub fokus penelitian mencakup perencanaan, pengadaan, dan pengawasan.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan sub fokus penelitian, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana perencanaan sarana dan prasarana pendidikan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading Jakarta Utara ?
- b. Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading Jakarta Utara ?
- c. Bagaimana pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading Jakarta Utara ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam implementasi

manajemen berbasis sekolah di SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading Jakarta Utara.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoriti**

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menjadi referensi pembelajaran ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen pendidikan,

### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi di SMA Islam Al Azhar Kelapa Gading Jakarta Utara, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, sehingga dapat dijadikan referensi bagi sekolah.
- b. Bagi institusi pendidikan lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan atau menerapkan pengelolaan sarana dan prasarana dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan layanan mutu sekolah, dan peserta didik.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan, dan wahana untuk melatih keterampilan menulis

karya ilmiah serta sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.

- d. Bagi pembaca hasil penelitian ini sebagai referensi dan menambah ilmu pengetahuan tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah.